

Kencangkan Ikat Pinggang Demi Pembangunan, Pemangkasan Anggaran Diklaim Tak Menyentuh Infrastruktur



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID MINGGU, 16/02/2025

SETELAH menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mempersilakan tamu gelaran Nusantara *International Partners Visit* (NIPV) 2025 untuk melepas penat di pondok MHHT.

Dari lokasi seluas 107 hektare itu, di seberang pondok, para delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) 10 negara dan lembaga keuangan serta multilateral bisa menyaksikan dari jauh gedung Istana Garuda dan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Sembari disuguhi getuk, kacang, risoles, roti lapis hingga minuman jahe dan kopi, para perwakilan dari negara Eropa dan Asia mengungkapkan kekaguman mereka terhadap perkembangan pembangunan IKN. Di tengah hutan industri yang saat ini masih didominasi pohon Eukaliptus tersebut.

Digelar selama dua hari, 13-14 Februari 2025, Basuki menyebut kegiatan NIPV 2025 itu termasuk sederhana. Efek dari pemangkasan anggaran yang kini mendera lembaga dan kementerian negara, termasuk di pemerintahan daerah.

Seharusnya, lanjut dia, NIPV berbentuk pameran atau ekspo besar. Karena menurut Basuki, acara itu merupakan bentuk terima kasih kepada negara-negara yang telah banyak membantu pembangunan IKN.

"Sejak berdirinya IKN ini, banyak *support* dari mereka, lembaga keuangan dan negara-negara sahabat. Menjadikan IKN sebagai *smart city dan forest city*. Dari ADB (*Asian Development Bank*), Australia, Belanda, Inggris, dan lainnya," beber Basuki, Jumat (14/2).

Menurutnya, karena ada penghematan anggaran, maka Otorita IKN menjadikan NIVP sebagai *international visit*. "Eksponya sebenarnya tetap ada. Dibuka untuk umum di galeri. Berlangsung sebulan. Namun dilangsungkan sederhana saja," jelasnya.

Efisiensi anggaran di Otorita IKN sebelumnya menimbulkan banyak polemik. Khususnya terhadap kelanjutan pembangunan IKN. Mengingat pada tahap kedua itu, pekerjaannya dikomando langsung oleh Otorita IKN.

Bukan lagi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ketika Basuki menjabat sebagai Menteri PUPR pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun dipastikan Basuki, pemangkasan anggaran tidak menyentuh pada sektor infrastruktur. "Yang dipangkas itu hanya 'lemak-lemaknya saja. 'otot-ototnya tetap," yakinnya.

Itu berdasarkan keputusan hasil rapat di DPR sebelumnya. Ketika Basuki mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI untuk membahas efisiensi anggaran yang tertera pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Otorita IKN Tahun 2025, pada Rabu (12/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, DIPA Awal Otorita IKN untuk Tahun Anggaran 2025 adalah Rp6.395.534.826.000. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp5.242.034.826.000.

Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk DIPA awal sebesar Rp1,15 triliun. Efisiensi itu ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, *focus group discussion* (FGD), terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan kegiatan ATK (alat tulis kantor).

"Itu tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal. DIPA awal ini adalah

sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025, yang saat itu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp48,8 triliun," ujar Basuki.

Otorita sendiri sudah menyusun tiga skema pembangunan IKN. Dari APBN, yang telah disetujui presiden senilai Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua (2025-2028). Kemudian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai bagian penting mempercepat target pembangunan.

Dengan nilai Rp60,93 triliun. Lalu investasi swasta murni senilai Rp6,9 triliun. Dirinya yakin, tahun 2026 nanti, wajah IKN sudah akan mengalami banyak perubahan. "Tahun ini enam bank akan memulai pembangunan setelah lebaran (Idulfitri) ini. Targetnya semester I 2026, sudah beroperasi. Tahun ini kami juga melelang sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan, air, dan MUT (*multi utility tunnel*)," bebarnya.

"Kemudian saat lebaran nanti sudah mulai dibangun. Kami tunjukkan kepada mereka, komitmen dari Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Termasuk target IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028," sambung Basuki.

KENCANGKAN IKAT PINGGANG

Menteri Keuangan Sri Mulyani menelurkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

Di mana berisi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 dipotong sebesar Rp15,67 triliun dari pagu awal Rp446,63 triliun. Sehingga menjadi Rp430,95 triliun. Berikutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dipangkas setengahnya. Dipotong Rp18,3 triliun dari pagu awal Rp36,95 triliun. Sehingga dana DAK yang akan ditransfer ke beberapa Pemda menjadi Rp18,64 triliun.

DAU dan DAK Fisik itu menjadi dua dari enam *item* penyesuaian anggaran yang sumbernya diambil dari dana transfer ke daerah (TKD). Lainnya yakni kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Dana Desa.

Kaltim sebagai salah satu penerima, telah menerima salinan berapa besar perubahan DAU dan DAK yang bakal diterima. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. DAU Kaltim dipangkas Rp2 miliar. Dari sebelumnya Rp1,04 triliun, menjadi Rp1,02 triliun.

Sementara untuk DAK Fisik tidak ada perubahan. Adapun di tingkat kabupaten/kota, untuk DAU, rerata pemangkasan berada di DAU berada di kisaran Rp2-102 miliar. Terbanyak dipangkas adalah Mahakam Ulu (Mahulu). Begitu pula di DAK Fisik. Di mana Mahulu yang seharusnya menerima Rp38 miliar, akibat efisiensi menjadi nol alias tidak dianggarkan.

Menghadapi postur TKD tersebut, Pemprov Kaltim pun menerima kebijakan pusat. Pekan lalu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan, akan merelokasikan APBD 2025. Itu sebagai bentuk ketaatan terhadap turunnya Inpres dari Presiden. Apalagi efisiensi yang dimaksud, bukan hanya soal pengurangan anggaran. Melainkan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Mungkin beliau (Presiden Prabowo Subianto) melihat masih banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Khususnya untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja. Seperti perjalanan dinas. Itu seharusnya mendukung kinerja. Buat apa perjalanan dinas kalau tidak ada kinerjanya? Itu adalah pandangan yang saya sampaikan berdasarkan arahan Menteri Keuangan," beber Akmal kepada awak media.

Sebelumnya, disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry pada rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim yang dihadiri Sekprov Sri Wahyuni di Hotel Fugo, Samarinda, Senin (10/2).

Kata Sarkowi, jika Kaltim berpotensi harus memangkas anggaran Rp405.302.513.763 dampak dari keluarnya Inpres Nomor 1/2025. Sehingga APBD Kaltim 2025 yang semula sebesar Rp20,1 triliun terkoreksi menjadi Rp19.697.486.237.

Adapun Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menegaskan, pemangkasan anggaran 2025 tidak akan menyentuh tiga komponen. Yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DPRD Kaltim disebutkan telah melakukan komunikasi kepada Gubernur Kaltim melalui Sekprov dan jajarannya. Di mana di luar tiga komponen di atas, ada 13 komponen yang bakal mendapat efisiensi.

"Salah satunya yang paling signifikan itu perjalanan dinas. Mencapai 50 persen. Karena komponen itu memang tidak prorakyat. Jadi kami (DPRD Kaltim) setuju. Lebih baik dimanfaatkan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ucap Sabaruddin, Selasa (11/2).

Selain di provinsi, kabupaten/kota juga memutuskan untuk mengencangkan ikat pinggang di sektor pemerintahan. Balikpapan misalnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Muhaimin menyatakan, bahwa efisiensi dilakukan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, konsumsi dalam rapat, serta alat tulis kantor (ATK) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kita tidak sampai menerapkan *work from home* (WFH). Efisiensi itu lebih kepada pemangkasan anggaran perjalanan dinas, konsumsi, dan ATK, tanpa mengganggu pelayanan dan program prioritas," ujar Muhaimin kepada awak media, Kamis (13/2).

Ia mencontohkan bahwa anggaran perjalanan dinas di setiap OPD yang semula Rp100 juta akan dikurangi hingga 50 persen menjadi Rp50 juta. Jumlah peserta perjalanan dinas pun turut disesuaikan. Untuk konsumsi dalam rapat, yang sebelumnya menyediakan makanan berat, kini dibatasi hanya camilan. Anggaran ATK juga dipangkas sekitar 20-30 persen.

Dengan kebijakan itu, Pemkot Balikpapan berharap pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor. "Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan publik dan pembangunan kota," sebut Muhaimin.

Untuk di Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan strategi yang terukur. Ia menyebut salah satu langkah yang disiapkan adalah menerapkan pola pembiayaan bertahap, menyesuaikan proyek dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

"Beberapa program yang semula direncanakan selesai dalam satu tahun dapat dijadwal ulang menjadi dua tahun. Ini upaya kita agar efisiensi tetap berjalan tanpa mematikan pembangunan," jelas Andi Harun, Jumat (14/2).

Sementara di Kutai Kartanegara (Kukar), Sekkab Kukar Sunggono menyebut, Pemkab Kukar telah melaksanakan efisiensi anggaran termasuk belanja infrastruktur yang dinilai bisa ditunda karena belum terlalu prioritas.

"Proyek pembangunan infrastruktur yang ditangguhkan di antaranya proyek pelebaran jalan di Muso Bin Salim, Kelurahan Melayu, Tenggarong, dan beberapa proyek pelebaran pada jalan-jalan kecil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar yang direncanakan untuk memperindah tata ruang Tenggarong," ujarnya dikutip dari rilis resmi yang diterima awak media, Jumat (14/2).

Namun beberapa proyek lanjutan seperti revitalisasi Pasar Tangga Arung, Jembatan Sebulu, dan Rumah Sakit tetap dilaksanakan. "Proyek besar sudah masuk RPJMD dan tinggal menunggu penyelesaian saja. *Inshaallah* tidak akan terganggu karena harus fungsional tahun ini," ujarnya.

Pemkab Kukar juga memutuskan melakukan efisiensi perjalanan dinas biasa sebesar 60 persen dan perjalanan dinas dalam kota sebesar 50 persen.

Selain itu juga dilakukan efisiensi dalam pengadaan peralatan gedung, pakaian dinas, serta pengadaan dan perawatan mobil dinas, bahan cetak, ATK, narasumber kegiatan seminar, makan dan minum dalam rapat, serta kursus. "Bupati Kukar (Edi Damansyah) juga menyampaikan instruksi untuk melakukan efisiensi sebesar 75 persen pada anggaran paket *mapping*," ungkap Sunggono. **(rd)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Kencangkan Ikat Pinggang Demi Pembangunan, Pemangkasan Anggaran Diklaim Tak Menyentuh Infrastruktur, 16/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

